



available online at:

<https://cakrawala.stieswadaya.ac.id/cakrawala/index.php/cakrawala>

Vol.16 No.1  
Januari  
(2022)

# Cakrawala

*Ekonomi & Keuangan*

Published by LPPM-STIE SWADAYA in collaboration  
with STIE SWADAYA Jakarta

P-ISSN : 0854-7793  
E-ISSN : 2714-643X

## **PARTISIPASI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN SIDRAP PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Abdul Rahman<sup>1\*</sup>

<sup>1\*</sup>STIE SWADAYA (Magister Manajemen)  
Jatiwaringin Raya No.26 (Jakarta Timur- 13620)  
*Email rahman.ip777@gmail.com*

### **ABSTRACT**

The study about Non-Governmental Organization participation on development was set in Sidrap Religion, the province of South Sulawesi. It based on fact that religion development need more than governmental decision in all kind of policy. Non government organizations were increase in numbers on recent years. And they played role as determinant factor to control the design of development and to collect people participation accros the area. This research is focused at the effort to answer the problem of how nongovernmental organization took its participation on region development, and what is the government efforts to increase level of participation along those organization. Using qualitative approach, the researcher as research instrument collected, processed, analyzed, interpreted and verified all of information and data from participatory observation on the setting which discribe communication and relationship between government and non-governmental organization. Data and information obtained through participation observation were, then, enriched and completed by unstructured interview to the good informants who meet the reach cases prerequisites, so its validity and reliability could be counted on. Afterwards, data and information were clarified, described, and explained using triangulation method with any social sciences theories, government sciences and the researcher's knowledge in order to formulate the answer of research questions. The research findings pointed out that participation of non-governmental organization is constitute as well as what Davis constructed on his theory. Davis believes that participation are form from emotional involvement, situation of groups, contribution to the aim and sharing responsibility. This research found all element on non- governmental participation, but its still limited. Furthermore, participation culture is weak among non-governmental organization. Seeing this problem it is recommend that government its self that could take an initiative to empowering all non- governmental organization. Through this, the level of participation could be increased, hipotetically.

**Keyword:** research, nongovernmental, interpreted.



## PENDAHULUAN

Persoalan hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah fenomena yang menarik untuk diteliti. Pada banyak kasus, kepentingan pemerintah dan masyarakat berbeda satu sama lain yang menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pemerintahan Kabupaten Sidrap juga menghadapi fakta yang sama. Kabupaten yang bernama lengkap Sidenreng Rappang ini merupakan salah satu Kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan yang sedang berkembang menuju ke arah kehidupan yang lebih baik. Memiliki luas wilayah secara keseluruhan 1.883,25 Km<sup>2</sup>, Sidrap yang terbagi menjadi 11 kecamatan merupakan model daerah penyedia pangan masa depan. Selain menghasilkan beras dari sistem pertanian sawah irigasi teknis, Sidenreng Rappang juga berpotensi sebagai daerah penghasil komoditi jambu mete, kakao dan kemiri. Ternak menjadi komoditas utama daerah Sidrap. Demikian halnya dengan produksi telur ayam yang terus meningkat dan mencapai nilai distribusi konsumsi hingga sebagian wilayah Kalimantan.

Masalah Pemerintah Kabupaten adalah bagaimana mengelola potensi pertanian menjadi kekuatan ekonomi daerah Sidenreng Rappang pada tingkat awal dan jika mungkin menjadi andalan provinsi Sulawesi Selatan. Guna mencapai tujuan itu, pemerintah Kabupaten berupaya membina kepentingan rakyat dan pemerintah dalam visi misi Kabupaten. Visi pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005- 2025, substansi RPJM Nasional, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat, serta visi-misi Bupati/Wakil Bupati. Visi Pembangunan Sidenreng Rappang kurun waktu 2009-2013 sebagaimana tertuang dalam RPJMD adalah :***"Mewujudkan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Pusat Agribisnis Modern dan Lima Terbaik di Sulawesi Selatan dalam Pembangunan Manusia"***. Yang dimaksud dengan Pengembangan Agribisnis Modern adalah melakukan upaya pada bidang produksi, pengolahan hasil dan pemasaran secara terpadu. Yang masaran seca dimaksud dengan 5 (Lima) Terbaik, indikatornya adalah dengan menggunakan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibandingkan IPM Kabupaten lainnya dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Mengingat IPM Kabupaten Sidenreng Rappang pada urutan 7 (tujuh). Indikator IPM lainnya adalah PDRB Per Kapita sebagai salah satu indikator untuk melihat rata-rata kemampuan masyarakat dari sisi pendapatan. Guna mencapai visi di atas, dikembangkan misi pembangunan daerah yang mencakup lima aspek masing-masing: (1) Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Agribisnis- Agroindustri melalui upaya menciptakan iklim yang kondusif dalam pengembangan usaha agribisnis dan agroindustri; (2) memantapkan Peningkatan Kualitas Manusia; (3) Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana Daerah; (4) Memelihara iklim kondusif dalam kehidupan masyarakat yang didalamnya terdapat upaya fasilitasi jaringan dan kolaborasi organisasi lokal/daerah dan pengarus-utamaan kesetaraan dalam mewujudkan kesetaraan golongan, kesetaraan gender. Keadilan sosial dan ekonomi dalam semua ini kehidupan masyarakat, dan memfasilitasi berfungsinya organisasi keagamaan, lembaga adat, organisasi wanita, lembaga swadaya masyarakat, Pemuda dan kemasyarakatan; (5) mengefektifkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance).

## METODE PENELITIAN

Pada metode ini yang lebih ditekankan adalah kemampuan seorang peneliti menggunakan teknik observasi dalam kegiatan penelitian. Dengan teknik observasi partisipan diharapkan dapat dijangkau keterangan-keterangan yang empiris yang detail dan aktual dari unit analisis penelitian. Apakah itu menyangkut kehidupan individu maupun unit-unit sosial tertentu dalam masyarakat. Secara lebih rinci studi kasus mengisyaratkan keunggulan-keunggulan (*Burhan Bungin; 2003 : 23*) sebagai berikut:

1. Studi kasus dapat memberikan informasi penting mengenai hubungan antar variable serta proses-proses yang memerlukan penjelasan dan pemahaman yang lebih luas.
2. Studi kasus memberikan kesempatan untuk memperoleh wawasan mengenai konsep-konsep dasar perilaku manusia. Melalui penyelidikan intensif peneliti dapat menemukan karakteristik dan hubungan- hubungan yang (mungkin) tidak diharapkan/diduga sebelumnya.
3. Studi kasus dapat menyajikan data-data dan temuan-temuan yang sangat berguna sebagai dasar untuk membangun latar permasalahan bagi perencanaan penelitian yang lebih besar dan mendalam dalam rangka pengembangan ilmu-ilmu social.

### Variabel Penelitian

Penelitian kualitatif cenderung tidak menyebut variabel penelitian. Dalam penelitian kualitatif fenomena penelitian yang dipandang sebagai variabel. Fenomena penelitian ini adalah gejala partisipasi lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan. Melalui pendekatan teoritik dan emik, gejala ini akan ditampilkan sebagai focus utama penelitian.

### Unit Analisis, Populasi, Sampel dan Responden

Unit analisis, populasi dan responden merupakan istilah yang diterima dalam penelitian kuantitatif. Meski demikian, penelitian ini akan mencoba menggunakan beberapa istilah di atas kecuali pada istilah responden akan diganti menjadi informan.

### Unit Analisis

Unit analisa penelitian ini adalah para ketua lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berada di Kabupaten Sidrap. Melalui mereka diharapkan penelitian ini dapat menjelaskan fenomena partisipasi lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan.

### Populasi

Populasi penelitian ini meliputi semua lembaga swadaya masyarakat dan instansi pemerintah serta lembaga sosial lainnya yang berada dalam wilayah Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah lembaga swadaya masyarakat ada 22, jumlah lembaga pemerintah ada 34, dan jumlah lembaga adat ada 4. Sampel adalah istilah yang dikenal dalam penelitian kuantitatif. Penelitian ini tidak menggunakan sampel tetapi memilih secara sengaja (purposive) kelompok kelompok swadaya masyarakat yang diketahui

berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah kabupaten Sidrap. Informan Sumber data penelitian ini adalah pengalaman dan persepsi lembaga swadaya masyarakat dan aparat pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan. Sumber data utama digali melalui observasi. Dalam penelitian ini sumber data adalah informan yang dapat dibagi dalam beberapa kelompok yaitu :

- a) Informan dasar, yaitu orang yang memberikan data secara tertulis dan lisan (kata-kata maupun tindakan) yang berkaitan dengan dirinya sendiri sebagai subjek penelitian. Informan dasar ditentukan oleh peneliti sendiri sesuai dengan kapasitas informan dalam hubungannya dengan variabel penelitian. Pada tahap akhir dari penyusunan kerangka pikir, variabel dan indikator penelitian telah dapat didefinisikan dengan jelas yang memungkinkan peneliti menentukan informan dasar dari penelitian ini.
- b) Informan kunci (key Informan), yaitu orang-orang yang menyajikan data melalui kata-kata serta tindakan yang direkam serta yang mengetahui betul masalah yang diteliti berkaitan dengan dirinya atau orang lain. Adapun mereka yang ditunjuk menjadi informan kunci adalah aparatur pemerintah daerah Kabupaten Sidrap, tokoh masyarakat Sidrap, tokoh politik di Sidrap, pimpinan organisasi massa, tokoh agama di Sidrap, aktivis LSM dan akademisi. Sedangkan cara menentukannya dengan teknik snow-balling yaitu data yang diterima dari nara sumber pertama langsung diolah sehingga informasi yang diterima tersebut dapat dijadikan dasar dalam penentuan informan dan informasi berikutnya. Penghentian perputaran roda informan dilakukan apabila telah dicapai tahap 'saturation' dalam pengambilan data.

Informan dalam penelitian ini adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten Sidrap yang terdiri atas Bupati, Wakil Bupati, Para Asisten dan Kepala Bagian, serta Pimpinan SKPD, legislatif daerah yang terdiri dari Pimpinan DPRD Kabupaten Sidrap, pelaku lembaga swadaya masyarakat yang terdiri dari ketua dan anggota lembaga swadaya masyarakat Kabupaten Sidrap dan tokoh masyarakat Kabupaten Sidrap. Informan penelitian ini secara rinci dapat disebutkan sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Daftar Informan Penelitian**

<b>Nomor</b>	<b>Informan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Bupati Sidrap	1
2.	Wakil Bupati Sidrap	1
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sidrap	1
4.	Asisten Bupati Bidang Pembangunan	1
5.	Kepala Bagian Pembangunan Setda Kab.Sidrap	1
6.	Kepala Bappeda Kabupaten Sidrap	1
7.	Ketua DPRD Kabupaten Sidrap	1
8.	Ketua Masyarakat Adat Kabupaten Sidrap	1
9.	Ketua LSM Kompleks	1
10.	Ketua LSM LPEK	1
11.	Ketua LSM KIPFA-RI	1
		<b>11</b>

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari aktivitas :

- 1) Wawancara. adalah percakapan dengan nara sumber atau informan terhadap objek yang diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk merekam persepsi dan opini tentang objek penelitian secara langsung dari kata-kata dan tindakan informan.

- 2) Pengamatan/Observasi, Pengamatan dilakukan secara langsung oleh peneliti terhadap fenomena dari objek yang akan diteliti, untuk merekam perilaku dan tindakan objek penelitian.
- 3) Telaah dokumen, yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan, memilah, dan mengelompokkan dokumen-dokumen atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan studi ini. Secara rinci maka upaya memasuki kancah penelitian terdiri atas langkah-langkah berikut.
  - a) Tahap persiapan a). Menyusun rancangan penelitian b). Memilih lapangan penelitian c). Mengurus perijinan d). Menjajaki dan menilai keadaan lapangan e). Memilih dan menetapkan nara sumber f). Menyiapkan perlengkapan penelitian.
  - b) Tahap pekerjaan lapangan Memahami latar penelitian dan persiapan diri. a). Pembatasan latar penelitian Sebelum memasuki pekerjaan lapangan, diperlukan untuk dapat memahami latar penelitian ini disamping mempersiapkan fisik dan mental. Latar penelitian ini ditemukan ditempat terbuka. b). Pengenalan hubungan penelitian dan persiapan diri. Hubungan keakraban antara peneliti dengan subjek penelitian perlu untuk diciptakan, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan perolehan data dan informasi secara akurat. c). Jumlah waktu studi Diupayakan seefisien dan seefektif mungkin oleh peneliti, dengan pedoman pada jadwal penelitian.
  - c) Memasuki lapangan Pada saat memasuki lapangan keakraban hubungan peneliti dengan subjek penelitian perlu dijaga selama proses pengumpulan data, selain itu objektifitas peneliti tetap dipelihara sehingga tidak terbawa arus oleh subjek penelitian.
  - d) Berperan sambil mengumpulkan data a). Pengarahan batas study b). Mencatat data. c).

Petunjuk tentang cara mengingat data Instrumen utama penelitian ini adalah diri peneliti sendiri. Hal itu yang membedakan penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Penelitian ini juga diharapkan mampu mengkaji secara mendalam masalah yang menjadi fokus penelitian, yang kemudian dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang diajukan.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data tentang gambaran umum wilayah Kabupaten Sidrap yang meliputi kondisi geografi dan administrasi serta faktor yang merupakan variable yang berkaitan dengan partisipasi lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan dengan indikatornya yaitu :

- 1) Keterlibatan mental dan emosi lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan.
- 2) Situasi kelompok lembaga swadaya masyarakat
- 3) Kontribusi lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan.
- 4) Tanggung jawab bersama lembaga Swadaya masyarakat dalam pembangunan.
- 5) Pembinaan dan pengarahan pemerintah daerah terhadap lembaga swadaya masyarakat.

#### Teknik Analisis

Setelah data terkumpul, maka penelitian kualitatif membutuhkan pengujian keabsahan data. Keabsahan data menurut ( Moleong, 2003 : 320 ) adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi unsur :

- 1) Mendemonstrasikan nilai yang benar.
- 2) Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan.
- 3) Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya. Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan ( validitas ) dan keandalan (

realibilitas ) menurut versi positivisme dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri. Untuk itu dalam pengujian keabsahan data pada penelitian ini, peneliti memakai tehnik Triangulasi.

Pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan tehnik triangulasi. Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut (Moleong, 2004: 330). Triangulasi dapat dilakukan dengan sumber data dan peneliti atau pengamat lainnya.

Dalam hal ini yang terpenting adalah bahwa jangan terlampau banyak mengharapkan bahwa hasil pembandingan tersebut merupakan kesamaan pandangan, pendapat, atau pemikiran. Yang penting disini adalah bisa mengetahui adanya alasan alasan terjadinya perbedaan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh (Patton 1987 : 329 ) tersirat dalam karangan Moleong bahwa pada metode Triangulasi terdapat dua strategi, yaitu :

1. Bahwa pengecekan derajat kepercayaan dilakukan dengan penemuan hasil penelitian dalam beberapa tehnik pengumpulan data.
2. Bahwa pengecekan derajat kepercayaan dilakukan dengan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
3. Tehnik Triangulasi jenis yang ketiga ini ialah Pada tehnik dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan memanfaatkan kembali derajat kepercayaan data.

Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data. Pada dasarnya penggunaan suatu tim penelitian dapat direalisasikan dilihat dari segi tehnik ini. Caranya adalah dengan membandingkan hasil pekerjaan seorang analis dengan analis lainnya. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam na kategori dan kesatuan uraian dasar. Tahap analisis data meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Mengedit (editing) data, maksudnya hadala kegiatan memeriksa data yang terkumpul, apakah sudah terisi secara sempurna atau tidak, lengkap atau tidak cara pengisiannya sudah benar atau tidak atau yang belum lengkap atau belum benar cara pengisiannya dapat disisihkan (tidak ikut dianalisis) atau menyempurnakannya dengan jalan melakukan pengumpulan data ulangan ke sumber-sumber bersangkutan.
2. Mengodekan data, yaitu memberikan kode- kode tertentu pada masin-masing kategori atau nilai dari setiap variable yang dikumpulkan datanya.
3. Menganalisis dan menginterpretasikan data, analisis data menunjuk pada data kedalam susunan-susunan tertentu kegiatan mengorganisasikan dalam rangka menginterpretasikan data, ditabulasi sesuai dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab hipotesis penelitian.

Analisis dilanjutkan dengan penafsiran. Penafsiran data penelitian kualitatif menurut (Moleong, 2002:198) yaitu : Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menerapkan prosedur; (1) analisis deskriptif dengan mengembangkan kategori kategori yang relevan dengan tujuan, (2) Penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif dengan berpedoman pada teori yang sesuai.

Mengacu pada pendapat diatas maka data yang sudah dikumpulkan, diolah dan diinterpretasikan secara kualitatif dengan menjawab masala penelitian. Data tersebut ditafsirkan



menjadi kategori-kategori yang berarti menjadi bagian dari teori atau mendukung teori yang diformulasikan secara deskriptif.

Lokasi dan Jadwal Penelitian Penelitian ini berlangsung di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan dan mengambil latar (setting) atau situasi di mana berlangsungnya observasi dan Wawancara mengenai partisipasi LSM dalam pembangunan. Sedangkan yang menjadi lapangan (field) penelitian ini adalah birokrasi Kabupaten Sidrap. Guna mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal, maka penelitian ini arahkan pada suatu manajemen penelitian dengan jadwal yang disusun sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Kegiatan dan Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan Penelitian	2011-2012									
		Agst 2011-	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept
I	Observasi										
	Pembuatan Proposal										
	Bimbingan										
	Ujian Proposal										
	Revisi Proposal										
	Ujian Tesis										
	Revisi Tesis										

Sumber : Jadwal Kalender Akademik MAPD 2012.

Penelitian tentang partisipasi dan kerjasama LSM dan Pemerintah dalam pembangunan Kabupaten Sidrap periode 2010-2012 ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah pengamatan yang telah dilakukan penulis sejak awal penelitian. Tahapan ini ditempuh guna mendapatkan suatu konstruk konsep tentang fenomena yang terjadi di lapangan dengan fenomena yang dipahami penulis.

Pada tahap kedua, dilakukan penelitian yang meliputi pembuatan proposal, pengajuan proposal, ujian proposal, penelitian lapangan, pengolahan data, pembimbingan dan penulisan tesis, ujian tesis, dan revisi tesis.

Gambaran Umum Lokasi dan Institusi Penelitian Kondisi Geografis Kabupaten Sidrap terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi. Secara Geografis wilayah Sidrap berada pada 30430 sampai 4009° Lintang Selatan dan 119041° sampai dengan 120010° Bujur Timur. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sidenreng. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.506,19 km<sup>2</sup>. Penduduk asli daerah ini adalah suku Bugis yang ta'at beribadah dan memegang teguh tradisi saling menghormati dan tolong- menolong. Dimana-mana dapat dengan mudah ditemui bangunan masjid yang besar dan permanen.

Wilayah Sidrap berbatasan dengan:

- a) Kabupaten Pinrang dan Enrekang di bagian Utara
- b) Kabupaten Barru dan Sopeng di bagian Selatan
- c) Kabupaten Pinrang dan Kota Pare-pare di bagian Barat
- d) Kabupaten Luwu dan Wajo di Timur. Berdasarkan letak geografis ini, maka

Kabupaten Sidrap merupakan wilayah yang relatif strategis karena sebagian besar wilayahnya dilalui jalur transportasi utama di pulau Sulawesi, selain bahwa jalur itu merupakan jalur pariwisata ke tana Toraja yang dapat memberi keuntungan luar biasa apabila dimanfaatkan.

Secara topografi, kondisi alam Sidrap beraneka jenis. Pada wilayah landaian dimana kondisi topografisnya berupa rawa dengan air payau dimana tumbuh dan berkembang vegetasi palmase dan mangrove. Bergerak ke barat, terdapat lebih banyak dataran.

Musim penghujan dan kemarau di wilayah Sidrap berimbang. Pada periode Juni sampai September arus angin datang dari arah Australia mengakibatkan musim kemarau. Sementara pada periode Desember hingga Maret, angin dari Asia dan Samudra Pasifik menghasilkan hujan yang merata di Sidrap. Curah hujan Sidrap rata-rata 412,6mm dengan lama 22 hari. Sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 67,3mm.

Struktur geologi Sidrap tersusun dari batuan sedimen yang membentuk formasi dataran, sementara endapan permukaan wilayah ini terdiri dari aluvium dan rawa yang ditemui di beberapa daerah. Tanah di Sidrap terdiri dari jenis tanah organosol, Litosol, Alluvial, Hidromorf, Klei Humus, dan beberapa jenis umum lainnya.

Kondisi geografis ini sedikit banyak berhubungan dengan alokasi pemanfaatan lahan Sidrap. Hingga tahun 2011 (data statistik 2012), areal penggunaan lahan pertanian bukan sawah/dry land merupakan yang terbesar dengan angka 4.648 Ha. Kondisi Demografi Budaya daerah Sidrap sangat beragam. Penduduk utama Kabupaten adalah suku Bugis. Mereka mendiami daerah ini untuk periode yang lama. Permulaan masa penyebaran suku-suku di Sulawesi dapat ditandai sebagai periode awal pendudukan Sidrap oleh masyarakat Bugis. Dari sisi potensi, Sidrap memiliki Kulit sumber daya manusia cukup memadai. Dari total 271.801 jiwa menurut statistik tahun 2010. Jumlah penduduk laki-laki ada 131.954 jiwa. Sementara data statistik tahun 2 jumlah penduduk perempuan mencapai 139.84. Jumlah angkatan kerja daerah ini mencapai 135.737 jiwa angkatan kerja (49,94%). Perkembangan jumlah angkatan kerja selama periode 2001-2012 mencapai rata-rata 2,25%. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten pada kurun waktu 1990-2011 mencapai 1,64% per tahun. Secara ringkas, profil penduduk, tingkat pertumbuhan dan kepadatan penduduk Sidrap pada tahun 2012 tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 5**  
**Jumlah Penduduk, Tingkat Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk**  
**Kabupaten Sidrap Tahun 2012**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk Per tahun 2004-2012(%)	Luas Wilayah (Ha)	Tingkat Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)
1	Tellu Limpoe	13.879	1.53	227,8	87.49
2	Panca Lautang	13.739	1.52	211,4	38.85
3	Watang Pulu	32.197	1.76	304	73.62
4	Baranti	29.077	2.06	201	82.25
5	Panca Rijang	13.459	0.81	227,2	39.10
6	Kulo	12.478	2.27	206,1	32.41
7	Maritengae	47.127	2.45	228	60.43
8	Sidenreng	28.589	0.0	403.1	58.72
9	Pitu Riawa	28.558	0.0	403.4	65.67
10	Dua Pitue	27.207	0.0	406	63.90
11	Pitu Riase	25.491	1.05	400,3	79.37
<b>Total</b>		<b>271.801</b>	<b>1.64</b>	<b>2.506,19</b>	<b>77,64</b>

Sumber : Profil Kabupaten Sidrap,2012,h.10.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan Watang Pullu merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar dan demikian pula dengan Volume tekanan penduduk pada lahan. Meski demikian, laju pertumbuhan penduduk terbesar ada di kabupaten Baranti. Sementara laju pertumbuhan di tiga kabupaten yaitu Maritengae.



Penduduk Sidrap merupakan penduduk dengan aktivitas luar rumah yang tinggi. Jika tidak bersekolah, penduduk beraktivitas di pasar, perkebunan, atau pekerjaan jasa lainnya. Aktivitas penduduk dalam rumah tangga hingga tahun 2012 tercatat hanya 18,11%. Sementara penduduk yang duduk di bangku sekolah sebesar 7,75%. Hal ini menunjukkan bahwa gerak aktivitas sangat tinggi dalam kegiatan produksi dan kegiatan lainnya. Kabupaten Sidenreng Rappang secara geografis dikelilingi oleh delapan Kabupaten/Kota tetangga yang juga sekaligus berada di tengah-tengah jazirah Sulawesi Selatan, menempatkannya sebagai jalur perlintasan transportasi utara selatan dan timur-barat begitupun sebaliknya khususnya di kawasan ajatappareng. Kondisi ini otomatis juga menjadikan Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki daya akses yang luas dan mudah dari segala penjuru, sehingga merupakan nilai tambah bagi Kabupaten Sidenreng Rappang dibanding dengan daerah lainnya. Posisi dan kekuatan yang dimiliki tersebut sangat berperan penting dalam mewujudkan cita-cita Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang seperti yang tertuang dalam visinya yaitu Terwujudnya Sidenreng Rappang sebagai Pusat Agribisnis Modern dan Lima Terbaik di Sulawesi Selatan dalam Pembangunan Manusia.

Potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang dimiliki Kabupaten Sidenreng Rappang seperti tanahnya yang subur dengan berbagai. Sidenreng Rappang memiliki keunggulan kompetitif untuk pengembangan Wian dan menghasilkan berbagai produk pertanian dalam arti luas (termasuk komoditi tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan). Struktur Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang sampai Tahun 2010 masih di dominasi oleh Sektor Pertanian yang memberikan kontribusi paling dominan terhadap PDRB yaitu sebesar 42,79 %, pertumbuhan sektor ini mencapai 1,52 %. Terbesar kedua dicatatkan oleh Sektor Jasa.

Hal ini dikarenakan meningkatnya secara signifikan sub-sektor administrasi pemerintah di Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga mampu menggeser sektor perdagangan menjadi penyumbang ketiga terhadap perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang. Sektor jasa menghasilkan kontribusi sebesar 24,35 % pada PDRB tahun 2010 dengan pertumbuhan 3,85 %, dengan pertumbuhan rata-rata dari tahun 2008 sampai 2010 sebesar 6,12 %. Dan sektor ketiga adalah perdagangan, hotel dan restoran yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah di tahun 2009, mencapai 11,45 % dengan pertumbuhan rata rata 9,46 % per tahun dalam kurun waktu tahun 2008 sampai 2010. Melihat statistik ini, maka sub-sektor perdagangan sangat potensial untuk dikembangkan sebab disamping telah memberikan porsi yang cukup berpengaruh terhadap PDRB, juga karena sektor ini mengalami pertumbuhan rata-rata 8,97 % setiap tahun sejak tahun 2007.

Secara umum laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2008-2010) mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Tingkat Pendapatan Regional Perkapita atau biasa disabud dengan Produk Domestik Regional Bruto Perkapita (PDRB Perkapita) di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2008 sebesar Rp. 9.596.593,-. Ini meningkat pada Tahun 2009 hingga 21,51 persen atau sebesar Rp. 11.660.748,-. Dan pada Tahun 2010 meningkat menjadi Rp. 12.387.006,- atau 6,23 persen. Jika diakumulasikan maka rata-rata pertumbuhan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir mencapai 16,56 persen.

Kondisi Budaya dan Faktor Pendorong Perencanaan Pembangunan Dari akar sejarahnya, Sidrap merupakan daerah yang dihuni oleh banyak suku bangsa. Karenanya, isu pluralisme merupakan sebuah bentuk loyalitas masyarakat kepada kesatuan komunitas mereka. Impelementasi isu ini adalah pembinaan generasi muda yang diarahkan untuk meningkatkan semangat dan kebanggaan dan tanggung jawab kepada daerah. Hanya sayangnya bahwa pembinaan budaya tradisional Sidrap berjalan amat lamban dan terkesan reaksional.

Apabila budaya di sini berkaitan dengan pembicaraan tentang etnis dan suku bangsa maka budaya Sidrap bertumpu pada beberapa etnis asli dan pokoknya yaitu Bugis. Daerah seperti Pitu Riase, Maritengae dan Tellu Limpoe adalah basis kebudayaan Bugis di sana. Selain etnis asli tersebut telah berkembang pula penduduk yang berasal dari etnis luar seperti : Jawa, Makasar, Sunda, dan lain lain. Keberadaan berbagai etnis yang ada diseluruh penjuru daerah ini memperkaya khazanah budaya Bhinneka Tunggal Ika.

Masing-masing etnis memelihara budaya nenek moyang mereka sebagai suatu kebanggaan. Kendati demikian mereka membaur dan berakulturasi. Bentuk mong paling sederhana ialah adanya saling tukar menukar seni budaya dalam masyarakat Sidrap. Orang-orang Pitu Riase berusaha belajar serta menampilkan lagu dan kesenian etnis Makassar, sementara orang-orang Jawa belajar menguasai bahasa Kulo.

Dari segi kehidupan beragama, Sidrap mewarisi tradisi toleransi yang agung yang ditinggalkan jejak kerajaan dahulu. Hingga tahun 2012, penduduk Sidrap memeluk dan beribadah dalam bermacam agama, dengan komposisi terbesar dikonstruksi oleh masyarakat Islam yang memberi warna pada karakter dan corak budayanya. Jumlah pemeluk agama Islam di Sidrap pada tahun 2012 mencapai 260.037 jiwa (94,2%). Sementara pemeluk agama Katolik mencapai 1,65%, Kristen Protestan ada 1,60%, Hindu 0,94%, dan Budha dianut 1,6% Distribusi sarana peribadatan di Sidrap bervariasi bila dibandingkan dengan jumlah pemeluk agama. Hingga tahun 2012, di Sidrap terdapat 3.872 masjid, 1.665 mushola dan 2.383 langgar. Sementara gereja protestan gereja Katolik, pura, dan vihara masing-masing 1 buah. Pemerintah Daerah terus memfasilitasi pembangunan sarana peribadatan dalam tujuan menjamin kebebasan beribadah tiap warga negara.

Kehidupan toleransi umat beragama di Sidrap tergolong baik. Kerjasama antar umat beragama dipertahankan dalam konteks sosial kemasyarakatan. Demikian juga dialog antar tokoh agama dipelihara dalam rangka mempererat komunikasi atas dasar saling pengertian. Umat Islam memainkan peran dominan dalam upaya membuka dialog dan kerjasama antar umat beragama dalam tujuan menjawab permasalahan-permasalahan sosial yang tidak tertangani oleh pemerintah. Kerukunan antar umat beragama merupakan kekuatan pokok perencanaan pembangunan di Sidrap. Forum-forum diskusi keagamaan biasanya mengangkat isu-isu kemiskinan, kemelaratan, dan agenda untuk menyelesaikan masalah masalah tersebut. Usulan forum diskusi dikirim kepada pemerintah melalui Bappeda. Pemerintah biasanya memenuhi permintaan forum diskusi terkait dengan agenda perencanaan dan penuntasan kemiskinan.

Tahun 2011 ada 11 proyek pembangunan dengan tema penyelesaian kemiskinan yang dirilis pemerintah daerah. Kesebelas proyek itu adalah usulan dari kelompok diskusi antar umat beragama. Selain itu, Bappeda juga memiliki kriteria sendiri dalam penentuan sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan. Dalam hubungannya dengan forum musyawarah antar umat beragama, jika usulan itu datang dari pemerintah, maka tokoh agama akan dilibatkan dalam pengawasan pembangunan di daerahnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil Penelitian Pembangunan Kabupaten Sidrap dan Hasilnya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang 2009-2013 yang telah memasuki Tahun ketiga disasarkan untuk mewujudkan visi didalam RPJMD yaitu *"Terwujudnya Sidenreng Rappang sebagai Pusat Agribisnis Modern dan Lima Terbaik di Sulawesi Selatan dalam Pembangunan Manusia "*, maka dirumuskan misi Kabupaten Sidenreng Rappang yang bertujuan :

1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Agrobisnis-Agroindustri;
2. Memantapkan Peningkatan Kualitas Manusia;
3. Membangun dan Mengembangkan Sarana dan Prasarana Daerah;
4. Memelihara Iklim Kondusif dalam kehidupan Masyarakat;
5. Mengefektifkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance).

Strategi dasar pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan pemerintah melalui upaya-upaya pelayanan dalam rangka pemberdayaan, pembangunan dan pengaturan (regulasi) serta pada misi yaitu Penciptaan Lingkungan Kondusif serta Pemihakan Kepada Kelompok Masyarakat Kecil tanpa mengabaikan keberadaan dan peran masyarakat menengah keatas. Sedangkan arah kebijakan umum pembangunan daerah mengandung arti sebagai operasionalisasi dari visi dan misi daerah untuk jangka waktu tertentu, olehnya itu arah dan kebijakan pembangunan yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rencana strategis harus seoptimal mungkin memperhatikan kondisi obyektif, lingkungan strategis dan peluang yang dapat dicapai.

Kebijakan umum pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang yang dijabarkan dalam sembilan poin kebijakan umum dapat saling terkait dan bersinergi satu sama lain, yaitu :

1. Peningkatan nilai produksi dan nilai tambah usaha tani;
2. Penciptaan zona agribisnis dan agroindustri;
3. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan;
4. Peningkatan akses dan derajat kesehatan;
5. Pemantapan struktur ekonomi daerah;
6. Pengembangan lapangan kerja dan usaha;
7. Pembangunan sarana dan prasarana daerah;
8. Penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan;
9. Penguatan kelembagaan pemerintahan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan paparan penelitian pada bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa :

1. Partisipasi lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah di Kabupaten Sidrap diwujudkan dalam bentuk fisik; (a) berupa keterlibatan lembaga swadaya masyarakat dalam perencanaan program dan pengawasan program pembangunan, dan (b) non fisik; berupa penciptaan situasi kelompok dan ikatan emosional yang menjamin terpeliharanya hubungan lembaga swadaya masyarakat dengan pemerintah.
2. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Sidrap dalam meningkatkan partisipasi lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah antara lain pertama, pembinaan melalui perjanjian bersama. Kedua bantuan keuangan secara tunai dan non tunai. Ketiga pembinaan sumber daya manusia anggota dan pengurus lembaga swadaya masyarakat guna menciptakan lembaga swadaya masyarakat sebagai wadah kontrol yang efektif.

Adapun saran-saran yang dapat direkomendasikan sebagai hasil akhir studi ini meliputi :

1. Partisipasi lembaga swadaya masyarakat dalam bentuk partisipasi fisik disarankan untuk dibatasi karena pada taraf tertentu lembaga swadaya masyarakat justru berperan sebagai lembaga pelaksana proyek pembangunan. Sebaliknya, partisipasi dalam bentuk non fisik

selayaknya ditingkatkan dalam rangka peningkatan pengawasan pembangunan. Pembentukan isu-isu pembangunan maupun isu kebocoran pembangunan oleh lembaga swadaya masyarakat melalui media massa justru memperkuat peran lembaga swadaya masyarakat.

2. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Sidrap dalam meningkatkan partisipasi lembaga swadaya masyarakat selayaknya diarahkan pada tiga agenda pokok. Pertama, pembinaan melalui perjanjian bersama yang lebih selektif dan profesional. Kedua bantuan keuangan dari pos pembinaan kelembagaan Dinas Kesatuan Bangsa dan dapat dikembangkan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sidrap yang terkait. Ketiga pembinaan sumber daya manusia anggota dan pengurus lembaga swadaya masyarakat dan mengintensifkan wadah dialog yang selama ini sudah berjalan, agar lembaga swadaya masyarakat yang tidak memiliki kerja resmi dengan pemerintah dapat menyalurkan aspirasinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Albrow, Martin. 1998. Birokrasi. M. Rusli Karim dan Totok Daryanto (pen). Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Alfian dan Syamsuddin, Nazaruddin (ed). 1991. Profil Budaya Politik Indonesia. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Al Rasyid, Harun. 1994. Statistika Sosial. Teguh Kismantoroedji (penyunting). Bandung : Program Pascasarjana UNPAD.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta.
- Blau, Peter M., dan Meyer Marshall. 2000. Birokrasi Dalam Masyarakat Modern. Penerjemah : Slamet Rijanto. Jakarta : Prestasi Pustakaraya.
- Djopari, J.R.G. 1995. Hubungan Pusat Daerah : Fungsi Akses dan Kebebasan, dalam Widyapraja. Jakarta : IIP Press.
- Dwiyanto, Agus. 1995. Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik. Makalah Seminar Sehari Kinerja Organisasi Publik Kebijakan dan Penerapannya, 20 Mei 1995. Yogyakarta : Jurusan Administrasi Negara Fisipol UGM.
- Effendy, Onong, Uchjana. 1992. Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikasi. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- ... 1999. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Effendy, Sofyan. 2000. Pelayanan Publik, Pemerataan dan Administrasi Negara Baru dalam Prisma Nomor 12 Pelayanan Publik Sampai Di Mana. Jakarta : LP3ES.
- Gaspersz, Vincent. 1997. Manajemen Kualitas : Penerapan Konsep – Konsep dalam Manajemen Bisnis Total. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Gibson, James L., John M. Ivancevich & James H. Donnelly Jr. 1997.
- Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses. Jilid 1, Edisi kedelapan. Terjemahan Nunuk Adiani. Jakarta : Binarupa Aksara.
- Hidayat dan Sucherly. 1986. Peningkatan Produktivitas Organisasi Pemerintah dan Pegawai Negeri Kasus Indonesia, dalam Jurnal Prisma, Nomor 12 LP3ES, Jakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi. 1996. Etika Administrasi Negara. Jakarta : PT. Raja

Baru. Jakarta : Yarsif Watampone.  
 .1997. Makna Pemerintahan, Tinjauan Kepemimpinan dan Etika. Jakarta : Yarsif Watampone.  
 Dari Segi Robbins, Stephen P. 1994. Teori Organisasi : Struktur, Desain dan Aplikasi edisi  
 Alih Bahasa : Jusuf Udaya. Jakarta : Arcan.  
 Ruslan, Rosady. 1998. Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi (Konsep  
 Grafindo Persada. dan Aplikasi). Jakarta : Rajawali Press. Mangkunegara, Anwar Prabu. 2000.  
 Saefullah, A. Djadja. 1999. Konsep dan  
 Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung : Rosdakarya.  
 Mas'ood, Mohtar dan Colin MacAndrews. 1993. Perbandingan Sistem Politik.  
 Yogyakarta : Gadjah Mada Press. Moenir, H. A. S. 1995. Manajemen  
 Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara.  
 Moore, Frazier. H. 1987. Hubungan Masyarakat, Prinsip, Kasus, dan Masalah.  
 Bandung : Remaja Rosda Karya. Muhaimin, Yahya dan Colin McAndrews.  
 1981. Masalah-masalah Pembangunan Politik. Yogyakarta : UGM Press.  
 Nazir, Muhammad. 1988. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia.  
 Ndraha, Taliziduhu. 1995. Budaya Pemerintahan dan Dampaknya Terhadap  
 Pelayanan kepada Masyarakat. Jakarta : Jurnal Ilmu Pemerintahan Edisi Ketiga.  
 . 1997. Metodologi Ilmu Pemerintahan, Jakarta : Rineka Cipta.  
 1998 Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta : Rineka Cipta.  
 . 2000. Ilmu Pemerintahan 1 - V. BKU Ilmu Pemerintahan Jakarta : IIP-UNPAD.  
 . 2003. Kybernology jilid 1 dan 2. Jakarta  
 : Rineka Cipta.  
 Ngadijono A.J. 1984. Kelembagaan dan Masyarakat. Jakarta : PT. Bina Aksara.  
 Pace, Wayne. R, dan Faules, F. Don, 1998, Komunikasi Organisasi, Strategi  
 Meningkatkan KinerjaPerusahaan.  
 Bandung : Remaja Rosda Karya.  
 Pamudji, S. 1994. Profesionalisme Aparatur Negara Dalam Rangka  
 Meningkatkan Pelayanan Publik. dalam Widyapraja, Edisi Ke-19 Tahun III Jakarta : IIP Depdagri.  
 Poloma, Margaret M. 1994. Sosiologi Kontemporer. Jakarta: RajaGrafindo.  
 Prawirohardjo, Soewargono. 1993. State of The Art dari Ilmu Pemerintahan.  
 Jakarta : Karya Dharma IIP.  
 Rasyid, M., Ryaas. 1991. Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde  
 Metode Pelayanan Umum, dalam Publik  
 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 1 Nomor 1. Bandung : UNPAD.  
 Salusu, J. 1996. Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan  
 Organisasi Non Profit. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.  
 Sedarmayanti. 1996. Tata Kerja dan Produktivitas Kerja dan Tinjauan dari Aspek  
 Ergonomi atau Kaitan Antara Manusia dengan Lingkungan Kerjanya. Jakarta : Bandar Maju.  
 Siagian, Sondang P. 1998. Manajemen Abad 21. Jakarta : Bumi Aksara.  
 Simamora, Sahat, Drs. 1985. Pembangunan Politik dalam Perspektif. Jakarta :  
 Bumi Aksara.  
 Sudarsono, Juwono. 1982. Pembangunan Politik dan Perubahan Politik sebuah  
 bunga rampai. Jakarta : Gramedia. Supranto. 1997. Pengukuran Tingkat



- Kepuasan Pelanggan Untuk Menaikkan Pangsa Pasar. Jakarta : Rineka Cipta. Thoha, Miftah. 1991. Beberapa Aspek  
Kebijakan Birokrasi. Yogyakarta : Media Widya Mandala.
- 1998. Deregulasi dan Debirokratisasi Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Masyarakat Dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia. Jakarta : PT. Pustaka LP3ES.
- . 1999. Prilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Prawirohardjo, Soewargono. 1993. State of The Art dari Ilmu Pemerintahan. Jakarta : Karya Dharma IIP.
- Rasyid, M., Ryaas. 1991. Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru. Jakarta : Yarsif Watampone.
- .1997. Makna Pemerintahan, Tinjauan Dari Segi Kepemimpinan dan Etika. Jakarta : Yarsif Watampone.
- Robbins, Stephen P. 1994. Teori Organisasi : Struktur, Desain dan Aplikasi edisi 3. Alih Bahasa : Jusuf Udaya. Jakarta : Arcan.
- Ruslan, Rosady. 1998. Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi (Konsep dan Aplikasi). Jakarta : Rajawali Press. Saefullah, A. Djadja. 1999. Konsep dan Metode Pelayanan Umum, dalam Publik  
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 1 Nomor 1. Bandung : UNPAD.
- Salusu, J. 1996. Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sedarmayanti. 1996. Tata Kerja dan Produktivitas Kerja dan Tinjauan dari Aspek Ergonomi atau Kaitan Antara Manusia dengan Lingkungan Kerjanya. Jakarta : Banda Siagian, Sondang P. 1998. Manajemen Abad 21. Jakarta : Bumi Aksara.
- Simamora, Sahat, Drs. 1985. Pembangunan Politik dalam Perspektif. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sudarsono, Juwono. 1982. Pembangunan Politik dan Perubahan Politik sebuah bunga rampai. Jakarta : Gramedia. Supranto. 1997. Pengukuran Tingkat  
Kepuasan Pelanggan Untuk Menaikkan Pangsa Pasar. Jakarta : Rineka Cipta. Thoha, Miftah. 1991. Beberapa Aspek  
Kebijakan Birokrasi. Yogyakarta : Media Widya Mandala.
- 1998. Deregulasi dan Debirokratisasi Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Masyarakat Dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia. Jakarta : PT. Pustaka LP3ES.
- . 1999. Prilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Tjiptono, Fandi. 1996. Manajemen Jasa. Yogyakarta : Andi.
- Triguno. 1997. Budaya Kerja : Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif Untuk Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta : PT. Golden Terayon Press.
- Warwick, Donald P. 1993. A Theory of Public Bureaucracy: Politics, Personality and Organization in The State Department. Cambridge, Mass : Harvard University Press.
- Wijaya, A.W. 2000. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta : Rineka Cipta.
- Yuwono, S. 1985. Ikhtisar Komunikasi Administrasi. Yogyakarta : Liberty.